

PUSKESMAS KOTA YOGYA SIAP LAYANI HIV/AIDS

Hingga September Tercatat 83 Penderita Baru

YOGYA (KR) - Sepanjang tahun 2022 lalu tercatat ada 114 jiwa penderita HIV/AIDS di Kota Yogya. Sedangkan sampai September 2023 ditemukan ada 83 penderita baru. Seluruh puskesmas di Kota Yogya pun siap memberikan pelayanan bagi penderita.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogya Aan Iswanti, mengatakan selain di 18 puskesmas di Kota Yogya penanganan HIV/AIDS juga dapat dilakukan di beberapa rumah sakit lainnya. “Tes HIV sekarang ini baru diwajibkan bagi populasi berisiko seperti wanita pekerja seks, laki-laki seks laki-laki, waria, penasun atau Injecting Drug User (IDU), warga binaan lapas, ibu hamil, serta orang yang mendapat transfusi darah,” ungkapnya, Jumat (24/11).

Deteksi dini terhadap orang yang memiliki risiko pun harus digencarkan. Semakin cepat penyakit ini bisa dideteksi, maka harapan hidup sehat dan produktif bagi para pengidap HIV/AIDS bisa semakin tinggi. Selanjutnya bagi orang dengan HIV yang sudah rutin mengonsumsi obat ARV dan ingin melakukan pengecekan Viral Load, bisa juga dilayani di puskesmas Kota Yogya. “Darahnya diambil

di puskesmas dan sampelnya dikirim ke RS Sardjito dan RSUD Wonosari. Pemeriksaan Viral Load ini tidak dipungut biaya,” jelasnya.

Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Imunitas Dinas Kesehatan Kota Yogya Endang Sri Rahayu, menambahkan dirinya mengimbau masyarakat jika mendapatkan gejala seperti demam berkepanjangan, diare tidak sembuh-sembuh, sariawan, sakit kepala, kelelahan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening untuk segera periksa ke fasilitas kesehatan agar segera mendapatkan penanganan. “Walaupun belum memiliki gejala seperti di atas, jika merupakan salah satu dari populasi berisiko, sebaiknya melakukan tes agar tahu statusnya dan segera tertangani,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 sebanyak 95 persen orang dengan HIV/AIDS menge-

tahui statusnya, melakukan pengobatan serta minum obat rutin. Apalagi tes Viral Load yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di RS Sardjito menggunakan BPJS secara berjangka, sekarang bisa dilakukan di puskesmas yang ada di Kota Yogya. “Orang yang terkena HIV jika minum obat setiap hari, bisa sehat karena virusnya tersupresi. Untuk melihatnya dibuktikan dengan tes Viral Load ini. Harapannya ini bisa dimanfaatkan penderita HIV di Kota Yogya dengan mendatangi puskesmas terdekat,” jelasnya.

Tes Viral Load berguna untuk mencari tahu kadar virus dalam darah. Tes tersebut dapat memberikan hasil yang cukup akurat karena dapat mendeteksi setidaknya 20 RNA HIV. “Kita sudah melakukan berbagai pencegahan terhadap penularan HIV/AIDS dengan melakukan skrining dan pendampingan. Selain itu, puskesmas yang ada di Kota Yogya juga terbuka bagi warga yang ingin mendapatkan konseling dan edukasi. Jika ditemukan pasien terinfeksi HIV/AIDS maka pasien akan mendapatkan pengobatan secara rutin dari puskesmas,” ungkapnya.

(Dhi)-f



DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

RIFKI LISTIANTO DORONG EKSEKUTIF SEMAKIN KREATIF Dongkrak Pendapatan Daerah Tanpa Beban Masyarakat

YOGYA (KR) - RAPBD Kota Yogya tahun 2024 diproyeksikan mampu menembus angka Rp 2 triliun. Seiring dengan peningkatan belanja untuk kepentingan warga, Pemkot Yogya diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Rifki Listianto SSi MSc, mendorong agar eksekutif semakin kreatif. Terutama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan harus lebih inovatif dalam merencanakan program kegiatan. Harapannya agar pendapatan daerah bisa naik signifikan tanpa ada warga yang terbebani.

“Kalau hanya sekadar menaikkan pajak atau retribusi, kenaikan pendapatan pasti akan terjadi. Namun itu bukan prestasi OPD penghasil pendapatan. Yang kita butuhkan ialah inovasi kreativitas kegiatan untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan,” ungkap Rifki yang menjabat Wakil Ketua Komisi B ini.

Menurutnya, kreativitas tersebut bisa dimulai dengan



KR-Istimewa

menggal kegiatan yang mampu didanai melalui alokasi dana dari Pemda DIY. Hal ini karena Kota Yogya merupakan pe-

nyangga Keistimewaan sekaligus ibukota provinsi. Sehingga semakin banyak kegiatan yang diusulkan melalui danais maka akan mengurangi beban APBD.

Selain itu, imbuh Rifki, kreativitas juga dibangun dengan menangkap peluang Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Terutama menyangkut kegiatan atau pembangunan di kawasan strategis yang mendukung target program nasional. Seperti saat merevitalisasi Pasar Prawirotaman maupun pembangunan Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) yang seluruhnya berasal dari DAK. “Untuk menangkap peluang dana dari pusat ini dibutuhkan kreativitas jajaran eksekutif. Kami di dewan siap melakukan advokasi,” tandasnya.

Hal yang tidak kalah penting ialah pemberian reward bagi masyarakat yang sudah patuh dan tertib dalam membayar pajak maupun retribusi. Apresiasi tersebut juga bisa mendorong warga lainnya agar bersamasama ikut terlibat dalam pembangunan. (Dhi)-f

MJE #3 Angkat Potensi Warga Muhammadiyah



KR-Juvintarto

Stan RS JIH menarik dengan pelayanan modern dalam MJE #3.

YOGYA (KR) - Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, menggelar Muhammadiyah Jogja Expo #3 (MJE #3), yang dibuka Jumat, (24/11) dan berlangsung hingga Minggu (26/11) di JEC. Menjadi edisi sebelumnya diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan.

“MJE #3 bertujuan mengangkat prestasi dan potensi warga Muhammadiyah se-DIY. Berserta organisasi otonomnya akan

bersatu untuk prestasi sekaligus potensi yang dimiliki,” tutur Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, Ikhwana Ahada kepada wartawan menjelang pembukaan

Kegiatan ini melibatkan 632 ranting dan 50 cabang Muhammadiyah di DIY. iKami optimistis, jamaah persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah menyambut antusias,” tandasnya didampingi Ketua Panitia Taufiq Ridwan SPd

MJE #3 mengusung tema: Muhammadiyah Mendunia, Berkemajuan untuk Bangsa. “Tujuan utama

MJE #3 adalah sebagai sarana implementasi pilar dakwah ekonomi Muhammadiyah yang sudah digagas sejak muktamar 2015 di Makassar. Juga ditunjukkan sebagai sarana dakwah Muhammadiyah yang menggembirakan bagi seluruh pengunjung,” jelasnya.

“Ada total 32 acara yang dirumuskan pada gelaran MJE #3 kali ini, semua itu akan dibagi dalam dua tempat, indoor dan outdoor, selama tiga hari. Acara dalam MJE #3 amat bervariasi, mulai diskusi akademik, kegiatan lomba, kegiatan yang sifatnya hiburan atau hobby. Semua ini tersedia bagi semua kalangan umur tanpa memandang gender,” jelasnya.

Ada juga penggalangan donasi untuk korban perang di Palestina. “Hingga saat ini donasi yang sudah terkumpul lebih Rp 2 miliar dan masih akan terus bertambah,” tandasnya. Informasi resmi MJE #3 bisa ydiakses di @muMJEhammadiyahjogjaexpo atau melalui kanal berita website: mediuma.com. (Vin)-f

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Janabadra Gelar FGD

YOGYA (KR) - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan program hibah penelitian Direktorat Riset, Teknologi Dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemdikbudristek tahun anggaran 2023, tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang terdiri Erna Sri Wibawanti, R Murjiyanto dan Wiwin Budi Pratiwi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) kedua di Hotel Santika Yogyakarta, Selasa (21/11).

Tema yang diangkat ‘Kajian Yuridis Penetapan Kasultanan dan Kadipaten Sebagai Subjek Hak Milik Atas Tanah di DIY’. Sebelumnya telah diselenggarakan FGD pertama pada 8 Agustus 2023.

Dalam kedua FGD tersebut menghadirkan narasumber antara lain dari Kanwil ATR/BPN DIY Tri Harnanto, Disperparu DIY Ajie Mardana, Panitikismo Kasultanan KRT Suryo Satrianto dan Sari Murti Widiyastuti, Panitikismo Kadipaten KPH Bayudono Suryoadinagoro, dan Akademisi dari UGM Any Andjarwati. Dengan peserta dari akademisi, beberapa perwakilan dari kantor ATR/BPN Kabupaten/ Kota dan PPAT.

“FGD tersebut dimaksudkan untuk memperoleh bahan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian,” terang peneliti, Erna Sri Wibawanti.

Erna menjelaskan, dengan ditetapkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak mi-



KR-Istimewa

Narasumber dan peserta saat FGD.

lik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dan diikuti dengan beberapa peraturan baik Pergub, Perda dan Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY. Maka ditindaklanjuti dengan inventarisasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik.

“Selanjutnya kepada masyarakat yang memanfaatkan dan menggunakan tanah Kasultanan atau Kadipaten yang selama ini hanya sebatas ngindung atau magersari berdasarkan Serat Kekancingan, atau menggunakan tanpa bukti hak, maka da-

pat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas tanah milik Kasultanan atau tanah milik Kadipaten dengan dibuat Akta Pemberian Hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Serat Kekancingan,” kata Erna.

R Murjiyanto menuturkan, dengan status HGB atau Hak Pakai maka dapat dialihkan, diwariskan atau dibebani Hak Tanggungan. Sedangkan untuk HGB atau Hak Pakai lama yang berasal dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten disesuaikan dengan penetapan HGB atau Hak Pakai di atas tanah milik Kasultanan atau tanah milik Kadipaten, dan dapat diberikan kepada pemegang semula berdasarkan Serat Kekancingan. (Dev)-f

LDII DIY Gelar Rakerwil 2023

YOGYA (KR) - Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII yang berlangsung awal November 2023 lalu di Jakarta, maka Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII DIY akan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada Minggu (26/11). Acara berlangsung secara luring di Kompleks Masjid Al Fatah Kadirojo II, Purwomartani Kalasan Sleman dan daring di Studio DPD dan PC LDII se-DIY.

Ir Atus Syahbudin SHut MAgR PhD, Ketua DPW LDII DIY menyampaikan bahwa Rakerwil ini bertujuan untuk mempertajam program LDII sekaligus mengevaluasi kegiatan selama ini. “Rakerwil ini sebagai tindak lanjut Rakemas, yang disesuaikan dengan potensi DIY,” ungkapnya di Kantor Jalan Sidobali No.16, Muja Muju, Umbulharjo Yogyakarta, Jumat (24/11). Rakerwil LDII DIY 2023 kali ini mengambil tema ‘Mewujudkan SDM Profesional Religius untuk Mendukung Keistimewaan Yogyakarta dalam Bingkai NKRI Menyongsong Indonesia Emas 2045’.

Dalam Rakemas, Ketua Umum DPP LDII Ir H Chriswanto Santosa MSc menegaskan kembali program LDII untuk bangsa yang



KR-Istimewa

Atus Syahbudin.

meliputi 8 bidang prioritas, yakni bidang kebangsaan, bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, pangan dan lingkungan, kesehatan alami, teknologi digital, dan bidang energi baru terbarukan. Dari kedelapan program di atas, segenap pengurus LDII di wilayah berkewajiban merealisasikan sesuai dengan potensi masing-masing.

Atus Syahbudin mengatakan, sudah banyak kegiatan yang dilakukan LDII DIY dalam merealisasikan program di atas. Bidang kebangsaan antara lain dengan mengadakan upacara bendera di pondok pesantren saat peringatan hari besar. Bidang keagamaan dan pendidikan, sejak usia kecil, anak, remaja, dewasa sampai tua diberikan ilmu agama secara rutin di setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) LDII.

Untuk bidang lingkungan, LDII DIY telah menyelenggarakan Pelatihan Dai Proklm, Kyai Peduli Sampah dan Kegiatan Sedekah Sampah Akbar. Sebenarnya sampah bukan masalah, tetapi bisa menjadi alat sedekah. “Hal terakhir ini diwujudkan saat musim kemarau tahun ini, yang berdampak kekeringan di beberapa wilayah dengan kegiatan Sedekah Air Pakai Sampah di Kabupaten Gunungkidul,” pungkas Atus. (Dev)-f

PALING BANYAK TERJADI DI KAMPUS

Tinggi, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

YOGYA (KR) - Kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih tergolong tinggi membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Ironisnya, kampus justru menjadi tempat yang paling banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal itu diperkuat dengan data tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 338.496 dan kekerasan seksual sebanyak 4.660. Dari jumlah tersebut kampus menempati posisi puncak dengan 27 persen laporan.

“Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama, karena kampus yang merupakan institusi pendidikan, justru terjadi kekerasan seksual. Hal ini tentu bertentangan dengan budaya di DIY. Oleh karena itu kami berharap para korban mau untuk *speak up*. Karena jika mereka tidak mengadakan kepada layanan, dikawatirkan bisa berdampak pada kualitas hidup dan mengganggu belajar di kampus,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi pada diskusi publik dengan tema ‘Kampus Ramah Perempuan dan Anak’ di Hotel Royal Ambarrukmo, Kamis (23/11).

Sementara itu Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah bentuk dari pelanggaran HAM yang harus dihapus dan dihentikan. Untuk itu pihaknya berkomitmen untuk turut serta dalam upaya untuk pencegahan dan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terkecuali di lingkungan kampus. Bahkan pihaknya mendorong korban kekerasan untuk berani *speak up*, melapor dan bersaksi atas kekerasan yang terjadi. Dengan begitu proses hukum dapat berjalan dan ditegakkan dengan baik.

“Berdasar data permohonan perlindungan ke LPSK 2022, pelaku oleh keluarga atau lingkungan terdekat terjadi dengan korban 93 orang dan kalangan pendidik 63 korban. Saat ini terlindung LPSK

pada 2023 (semester II) dalam tindak pidana Kekerasan seksual sebanyak 975 terlindung, kekerasan terhadap anak ada 47 terlindung dan kekerasan dalam rumah tangga 28 terlindung,” terangnya.

Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo menambahkan, kunci sukses mewujudkan kampus ramah perempuan dan anak yakni Satgas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah ada di setiap kampus harus aktif. Selain itu perlu dikampanyekan agar korban atau saksi yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual berani *speak up*. Untuk itu dukungan dari petinggi perguruan tinggi juga sangat penting untuk melawan kekerasan seksual di satuan pendidikan.

“Jadikan DIY yang dikenal sebagai Kota Pelajar menjadi pelopor semangat untuk mencegah dan bersuara soal kekerasan seksual di lingkungan kampus. Semua itu penting agar lingkungan pendidikan dapat menghasilkan generasi berkualitas tanpa adanya kekerasan,” paparnya. (Ria)-f